

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua tahun 2020-2025 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan strategi dan kebijakan. Rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Matriks Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah dengan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Satpol PP PBD Provinsi Papua

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
Masih Rendahnya Tingkat Keamanan, Kenyamanan dan Penegakan Hukum Daerah	Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat papua	Rasio Penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan guna meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Suasana tertib, aman dan kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kerjasama dengan lembaga- lembaga hukum - Jumlah Sosialisasi Perda/Perkada yang dilakukan - Jumlah penegakan Perda/Perkada yang dilakukan - Jumlah Kab/Kota yang mendapat pendampingan 	<p>Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga- lembaga penegak hukum dalam penerapan penegakan hukum dan HAM</p> <p>Mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kerjasama dalam pembinaan PPNS dan Satpol PP - Melakukan penegakan Perda dan Perkada - Melakukan peningkatan koordinasi OPD Provinsi, Satpol Kab/Kota dan instansi terkait serta lembaga penegakan hukum - Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan- aturan dalam Perda dan Perkada kepada masyarakat - Melakukan forum komunikasi dan temu konsultasi, Bimtek, Rakor dan Raker serta Gelar Pasukan dalam penyelenggaraan trantibum, linmas, dan penegakan perda

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Menumbuhkembangkan ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat - Melakukan operasi penertiban dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum - Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
					Meningkatkan keamanan dan ketertiban swakarsa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dan Satlinmas dalam pengamanan swakarsa - Melakukan pembinaan Satlinmas kab/kota se-Prov Papua
Masih Tingginya Resiko Bencana di Provinsi Papua	Menurunnya resiko bencana di Provinsi Papua	Indeks resiko bencana di Provinsi Papua	1. Meningkatnya kesiapsiagaan	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	<p>a. Meningkatkan Kapasitas ASN BPBD dalam upaya pengurangan resiko bencana</p> <p>b. Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan upaya pengurangan resiko bencana</p> <p>c. Meningkatnya Koordinasi dengan Stakeholder Terkait dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana</p>	<p>Peningkatan pengetahuan aparat BPBD Prov Papua dalam pengurangan resiko bencana</p> <p>Peningkatan Kesadaran masyarakat akan upaya pengurangan resiko bencana</p> <p>Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana</p>

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Meningkatnya keandalan dan kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Rata - rata waktu respon terhadap kejadian bencana	Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumberdaya dalam penanganan darurat bencana	- Peningkatan kapasitas ASN bencana dalam upaya penanganan darurat bencana - Peningkatan kecepatan respon dalam penanganan darurat bencana
			3. Meningkatnya Daerah terkena bencana yang tertangani	Persentase daerah terkena bencana yang telah tertangani	a.Meningkatnya Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	Peningkatan Jumlah daerah yang terpulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya Pasca Bencana
					b.Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pasca Bencana	Peningkatan Jumlah Daerah yang Terpulihkan Kondisi Sarana Prasarana Masyarakat Pasca Bencana
			4. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PBD Prov maupun Kab/Kota	Jumlah Kegiatan yang Dilakukan terkait Penguatan Kelembagaan PBD Prov maupun Kab/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan PBD Prov maupun Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PBD Prov maupun Kab/Kota

Sumber : Hasil Analisa Tim Renstra, 2020